

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adiwinata Saleh, A. Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983.

Adjie Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

_____, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Th. II, 3 September 2004.

_____, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28 Th. 111, 3 September 2005.

_____, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2007.

Azed Abdul Bari, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Pembaharuan Bidang Kenotariatan*, Media, Notariat, Edisi September-Oktober 2004.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni Bandung, 1986.

Barata Sumadi Surya, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Boediarso M. Ali, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia*, Jakarta, 2005.

Budiono Herlien, *Pertanggung jawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris diantara Negara Masyarakat, dan Pasar)*, *Renvoi* No. 4.28.III, 3 September 2005.

_____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

M. Hadjon, Philipus Dan Djatmiati Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hasbullah, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, <http://www.dephumham.go.id/templates.html>. diakses tanggal 30 Juli 2009.

Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.

Kohar A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Lamintang PAF, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*, Mandar Maju, Bandung, 1991.

Lubis, M Solly *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Manan, Bagir *Hukum Positif Indonesia*, UI Press, Yogyakarta, 2004.

Nawawi, Muhammad Affandi *Notaris Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004*, Mitra Media, Jakarta, 2006.

Notodisoerjo, R. Soegondo *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.

_____, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor : Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

Projohamidjojo, Mortiman *Laporan dan Pengaduan*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1982.

_____, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Rahardjo, Satjipto *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Ketentuan Mengenai Hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang direvisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000.

Keputusan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Proses Penanganan Perkara oleh Penyidik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Publik Official*.